



Krisis Kepemimpinan dan Tanggung Jawab Etis-Teologis dalam Bencana Ekologis Sumatera

Harlinton Simanjuntak

Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia, Jakarta

Email Korespondensi: harlinton.simanjuntak@reformedindonesia.ac.id

***Abstract:** The ecological disaster that occurred in Aceh, North Sumatra, and West Sumatra in November 2025 revealed an ethical-theological crisis in political leadership practices in Indonesia. The narrative friction between the government and the community, as well as various controversial legal and political policies, form the background of this study. Using a literature-based research method grounded in Colossians 3:17 and a social hermeneutic approach, this study analyses the socio-legal-political dynamics behind these disasters in relation to moral responsibility in governance. The results of the study reveal five main issues: deforestation and environmental destruction, weak disaster risk mitigation, problems with environmental law enforcement, unpreparedness and lack of responsiveness in disaster management, and ineffective and irrelevant public communication. These findings confirm that the ecological crisis in Sumatra is not merely a natural phenomenon, but a manifestation of leadership failure. A comprehensive evaluation of natural resource management is needed to realise environmental policies that are fair, sustainable, and in line with the principles of ethical-theological responsibility.*

***Keywords:** ecological disaster; Sumatera; political leadership; Colossians 3:17; ecological ethics.*

Abstrak: Bencana ekologis yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 memperlihatkan adanya krisis etis-teologis dalam praktik kepemimpinan politik di Indonesia. Friksi narasi antara pemerintah dan masyarakat serta berbagai kebijakan hukum dan politik yang kontroversial menjadi latar belakang penelitian ini. Melalui metodo riset literatur berbasis prinsip Kolose 3:17 dan pendekatan hermeneutika sosial, penelitian ini menganalisis dinamika sosial-hukum-politik di balik bencana tersebut dalam kaitannya dengan tanggung jawab moral dalam tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan lima persoalan utama: deforestasi dan perusakan lingkungan hidup, lemahnya mitigasi risiko bencana, masalah penegakan hukum lingkungan, ketidaksiapan dan ketidaksiapan penanggulangan bencana, serta komunikasi publik yang tidak efektif dan relevan. Temuan ini menegaskan bahwa krisis ekologis di Sumatera bukan sekadar fenomena alam, melainkan manifestasi dari kegagalan dalam kepemimpinan. Diperlukan evaluasi yang menyeluruh terhadap pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan kebijakan lingkungan yang adil, lestari, dan sesuai dengan prinsip tanggung jawab etis-teologis.

Kata kunci: bencana ekologis; Sumatera; kepemimpinan politik; Kolose 3:17; etika ekologis



Copyright:

© 2026. The Authors.

Licensee: This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 24 November 2025 bukan sekadar fenomena alam akibat Siklon Tropis Senyar, melainkan sebuah krisis ekologis yang bersifat sistemik. Skala kerusakan yang massif – mencakup ratusan korban jiwa dan hancurnya infrastruktur publik – mengonfirmasi adanya kegagalan structural dalam pengelolaan kawasan hulu.¹ Para ahli dan lembaga advokasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup seperti WALHI serta pakar hidrologi UGM menegaskan bahwa deforestasi akibat industri ekstraktif di sepanjang kawasan Bukit Barisan telah menghilangkan fungsi kawasan hutan sebagai penyangga ekologis, yang memperparah kerentanan wilayah hilir.²

Krisis ini menunjukkan kelalaian pemerintah dalam memitigasi dan melakukan penegakan hukum lingkungan yang komprehensif. Dominasi korporasi melalui banyaknya izin konsesi lahan untuk tambang dan perkebungan di kawasan rawan bencana mencerminkan adanya tumpang tindih regulasi serta penegakan AMDAL yang tidak memadai.³ Lebih jauh lagi, bencana ini menunjukkan kegagalan sistemik negara dalam melindungi hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat dan memadai, sebagaimana ditegaskan oleh Amnesty Internasional Indonesia dan HKBP yang menyerukan tanggung jawab moral serta audit hukum lingkungan secara menyeluruh.⁴

Ironi bencana ini semakin diperparah oleh kurang memadainya komunikasi publik pejabat pemerintah. Alih-alih menunjukkan empati, pernyataan pejabat publik cenderung

¹ Nabilah Muhamad, “962 Orang Meninggal dan 291 Orang Hilang dalam Bencana Sumatra (9 Desember 2025),” [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/69378441a41a8/962-orang-meninggal-dan-291-orang-hilang-dalam-bencana-sumatra-9-desember-2025), diakses 9 Desember 2025, <https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/69378441a41a8/962-orang-meninggal-dan-291-orang-hilang-dalam-bencana-sumatra-9-desember-2025>; Atalya Puspa, “Walhi: Bencana di Sumatra Merupakan Bencana Ekologis, Bukan Semata Dampak Siklon,” [mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com/humaniora/834882/walhi-bencana-di-sumatra-merupakan-bencana-ekologis-bukan-semata-dampak-siklon#goog_rewarded), diakses 9 Desember 2025, https://mediaindonesia.com/humaniora/834882/walhi-bencana-di-sumatra-merupakan-bencana-ekologis-bukan-semata-dampak-siklon#goog_rewarded.

² Agungnoe, “Bencana Banjir Bandang Sumatra, Pakar UGM Sebut Akibat Kerusakan Ekosistem Hutan di Hulu DAS,” [ugm.ac.id](https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-sumatra-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/), diakses 9 Desember 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-sumatra-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/>; Atalya Puspa, “Bencana Berulang di Sumatra, Peringatan Keras dari Hulu yang Rusak,” [mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com/humaniora/835695/bencana-berulang-di-sumatra-peringatan-keras-dari-hulu-yang-rusak), diakses 9 Desember 2025, <https://mediaindonesia.com/humaniora/835695/bencana-berulang-di-sumatra-peringatan-keras-dari-hulu-yang-rusak>; “Bencana di Sumatera Akibat Ulah Manusia,” [tempo.co](https://www.tempo.co/kolom/penyebab-banjir-sumatera-deforestasi-2094600?article_id=b77604fa-8986-4bb0-8c13-c35bfcd3360d&in=1&n_token=eyJ0eXAI0iJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1biI6IjBlNDVhODk4YzU4NzI5ODM4NDQ0ZDA0NzZjYzgyM2MzIn0.n3hfYWW6WV-qzF1rn16nhDNszZOHQGOmMaDoBoC_Dc), diakses 9 Desember 2025, https://www.tempo.co/kolom/penyebab-banjir-sumatera-deforestasi-2094600?article_id=b77604fa-8986-4bb0-8c13-c35bfcd3360d&in=1&n_token=eyJ0eXAI0iJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1biI6IjBlNDVhODk4YzU4NzI5ODM4NDQ0ZDA0NzZjYzgyM2MzIn0.n3hfYWW6WV-qzF1rn16nhDNszZOHQGOmMaDoBoC_Dc.

³ Insi Nantika Jelita, “Kerugian Akibat Bencana Sumatra Ditaksir Mencapai Rp68,67 Triliun,” [mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com/ekonomi/838074/kerugian-akibat-bencana-sumatra-ditaksir-mencapai-rp6867-triliun), diakses 9 Desember 2025, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/838074/kerugian-akibat-bencana-sumatra-ditaksir-mencapai-rp6867-triliun>; “Jatam: Bencana Sumatra Hasil Rancangan Negara,” [jakartasatu.com](https://jakartasatu.com/2025/12/09/jatam-bencana-sumatra-hasil-rancangan-negara/), diakses 9 Desember 2025, <https://jakartasatu.com/2025/12/09/jatam-bencana-sumatra-hasil-rancangan-negara/>.

⁴ Andhika Prasetyo, “HKBP: Banjir Sumatra Terjadi Karena Ulah Manusia,” [mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com/nusantara/836699/hkbp-banjir-sumatra-terjadi-karena-ulah-manusia), diakses 9 Desember 2025, <https://mediaindonesia.com/nusantara/836699/hkbp-banjir-sumatra-terjadi-karena-ulah-manusia>; M Ilham Ramadhan Avisena, “Bencana Sumatra adalah Bentuk Gagalnya Kebijakan Ekologis,” [mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/836152/bencana-sumatra-adalah-bentuk-gagalnya-kebijakan-ekologis), diakses 9 Desember 2025, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/836152/bencana-sumatra-adalah-bentuk-gagalnya-kebijakan-ekologis>.

defensif, politis, dan meremehkan peran solidaritas masyarakat sipil.⁵ Kegagalan komunikasi ini, yang diperkuat oleh kritik dari berbagai tokoh nasional, mencerminkan krisis integritas dan rendahnya sensitivitas kepemimpinan dalam merespons penderitaan korban. Secara keseluruhan, tragedy di Sumatera menuntut adanya transformasi kebijakan ekologis dan penguatan peraturan yang memprioritaskan keberlanjutan lingkungan hidup di atas kepentingan ekonomi jangka pendek.⁶

Bencana ekologis yang melanda Sumatera bukan sekadar kegagalan teknis-geologis, melainkan cerminan dari krisis moral dan teologis dalam mengemban amanat kepemimpinan politik. Secara teologis, pengrusakan alam dan ketidakpedulian otoritas politik terhadap korban merupakan bentuk krisis orientasi spiritual, di mana ambisi ekonomi telah menggeser tanggung jawab manusia sebagai pemelihara ciptaan dalam tatanan ekologis. Persoalan teologis muncul ketika kepemimpinan politik, yang seharusnya merepresentasikan keadilan ilahi, justru terperangkap dalam praktik pemerintahan yang menindas ekosistem dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan melalui komunikasi publik yang kurang memadai.

Dalam konteks ini, Kolose 3:17 menjadi pijakan teologis yang krusial. Perintah untuk melakukan segala sesuatu – baik perkataan maupun perbuatan – dalam nama Tuhan Yesus menuntut sebuah integritas total yang tidak memisahkan antara kesalehan pribadi dengan tanggung jawab public. Kolose 3:17 dipilih karena teks ini menyediakan kerangka etis normatif tentang segala sesuatu yang berarti setiap kebijakan politik, izin tambang, hingga narasi komunikasi pejabat harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kegagalan pemerintah dalam menanggapi bencana Sumatera bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan pelanggaran terhadap mandate etis Kolose 3:17 yang menuntut agar seluruh tindakan kepemimpinan dilakukan sebagai bentuk syukur dan pelayanan kepada Allah, bukan demi kepentingan korporasi atau kekuasaan semata.

Oleh karena itu, kegagalan sistemik dalam penanggulangan bencana di Sumatera menuntut sebuah evaluasi yang melampaui analisis politik praktis yaitu dengan

⁵ Kevin Seftian, “6 Pernyataan Asbun dari Pejabat Publik Saat Banjir,” *magdalene.co*, diakses 9 Desember 2025, <https://magdalene.co/story/kontroversi-pernyataan-pejabat-banjir-sumatera/>; Iwan Bahagia dan Halbert Chaniago, “Lima Pernyataan dan Tindakan Para Pejabat yang Dinilai ‘Tidak Empati’ kepada Korban Banjir Sumatra - ‘Perlu Empati yang Lebih Baik,’” *bbc.com*, diakses 9 Desember 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy9500835y1o>; “Anggota DPR Sindir Donasi Banjir Warga Cuma Rp10 M: Sok Paling-paling,” *cnnindonesia.com*, diakses 10 Desember 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251209060858-32-1304370/anggota-dpr-sindir-donasi-banjir-warga-cuma-rp10-m-sok-paling-paling>; Neressa Prahastiwi, “Sindiran Endipat Wijaya Soal Donasi 10 M Lewat Ferry Irwandi di Rapat DPR Picu Amarah Para Artis,” *suara.com*, diakses 10 Desember 2025, <https://www.suara.com/entertainment/2025/12/09/170358/sindiran-endipat-wijaya-soal-donasi-10-m-lewat-ferry-irwandi-di-rapat-dpr-picu-amarah-para-artis?page=all>; “Anggota DPR Minta Maaf ke Ferry Irwandi soal Sok Paling Aceh-Sumatra,” *cnnindonesia.com*, diakses 10 Desember 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251209154346-20-1304643/anggota-dpr-minta-maaf-ke-ferry-irwandi-soal-sok-paling-aceh-sumatra>.

⁶ Indrastuti, “Forum Dialog Konservasi Indonesia Desak RUU Kehutanan Pertimbangkan Kegentingan Ekologis,” *mediaindonesia.com*, diakses 9 Desember 2025, <https://mediaindonesia.com/humaniora/835405/forum-dialog-konservasi-indonesia-desak-ruu-kehutanan-pertimbangkan-kegentingan-ekologis>; “Ketua DPR RI Puan Maharani Minta Pejabat Jaga Komunikasi saat Bencana,” *tribunnews.com*, diakses 9 Desember 2025, <https://www.tribunnews.com/dpr-ri/7763020/ketua-dpr-ri-puan-maharani-minta-pejabat-jaga-komunikasi-saat-bencana>.

menganalisis melalui lensa etika Kristen yang ketat. Berangkat dari kegelisahan teologis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena bencana ekologis di Sumatera melalui perspektif etis-teologis berbasis Kolose 3:17, khususnya dalam konteks kepemimpinan politik Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini hendak mengidentifikasi masalah akuntabilitas dalam tata kelola lingkungan, mengkaji isu etis-teologis dari pola deforestasi dan komunikasi publik, menelaah bagaimana prinsip Kolose 3:17 dapat memberikan koreksi normatif, serta merumuskan implikasi praktis bagi tata kelola pemerintahan yang berkeadilan. Dengan demikian, rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana fenomena bencana ekologis di Sumatera dapat dipahami melalui analisis etis-teologis berbasis Kolose 3:17 dalam konteks kepemimpinan politik Indonesia?

Penelitian mengenai isu-isu etis-teologis dalam bencana ekologis di Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 24 November 2025, belum pernah dilakukan secara akademis formal. Studi yang ada saat ini bersifat non-akademis formal. Misalnya, Jemmy Ibnu Suardi, seorang peneliti ekoteologi dan pemerhati lingkungan, menyoroti bencana tersebut sebagai akibat kerusakan relasi manusia dengan alam yang dipicu oleh kebijakan negara yang permisif terhadap eksploitasi. Ia mendorong agar ekoteologi Nusantara dan kearifan ekologis masyarakat adat dijadikan dasar tata kelola lingkungan agar siklus bencana tidak berulang.⁷ Sementara itu, Muhammad Rais Abdillah, ahli Sains Atmosfer dari Institut Teknologi Bandung, menilai bahwa bencana ini disebabkan oleh interaksi hujan ekstrem dan degradasi lingkungan.⁸ Senada dengan itu, Hatna Suryatmojo menegaskan bahwa bencana terjadi akibat kerusakan ekosistem hutan.⁹ Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan baik dari sisi konteks masalah, metodologi, maupun relevansi dalam konteks saat ini. Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa di balik isu-isu etis yang tercermin dalam fenomena bencana ekologis Sumatera, terdapat prinsip-prinsip etis-teologis Kristen yang dapat memberikan kontribusi normatif bagi perbaikan kepemimpinan politik di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode riset literatur dengan pendekatan hermeneutika sosial yang dibingkai oleh prinsip etis-teologis Kolose 3:17. Pendekatan ini memungkinkan penafsiran fenomena sosial – dalam hal ini bencana ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 24 November 2025 – dengan mengkaji dinamika etis yang tersembunyi

⁷ Jemmy Ibnu Suardi, “Bencana Sumatera, Sebuah Pandangan Ekoteologis dan Krisis Kebijakan Lingkungan,” lampung.baznas.go.id, diakses 10 Desember 2025, <https://lampung.baznas.go.id/artikel/show/bencana-sumatera-sebuah-pandangan-ekoteologis-dan-krisis-kebijakan-lingkungan/33178>.

⁸ Mely Angrini, “Ahli ITB Ungkap Interaksi Atmosfer-Geospasial di Balik Banjir Bandang dan Longsor Sumatera,” ed. oleh Anggun Nindita, itb.ac.id, diakses 10 Desember 2025, <https://itb.ac.id/berita/ahli-itb-ungkap-interaksi-atmosfergeospasial-di-balik-banjir-bandang-dan-longsor-sumatera/63133>.

⁹ Agungnoe, “Bencana Banjir Bandang Sumatra, Pakar UGM Sebut Akibat Kerusakan Ekosistem Hutan di Hulu DAS.”

di balik peristiwa tersebut, kemudian membacanya secara dialogis dengan nilai-nilai etis yang terkandung dalam Kolose 3:17. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu etis dalam fenomena bencana ekologis, khususnya yang terkait dengan kepemimpinan politik, tata kelola lingkungan, dan akuntabilitas publik. Kedua, mengkaji prinsip-prinsip etis-teologis yang terdapat dalam Kolose 3:17. Ketiga, mempertemukan kedua temuan tersebut dalam dialog kritis untuk melihat bagaimana prinsip etis-teologis tersebut menilai, mengoreksi, atau menantang pola kepemimpinan dan tata kelola lingkungan yang berkontribusi pada bencana. Melalui proses ini, penelitian ini kemudian merumuskan implikasi etis-praktis yang relevan bagi pemerintah Indonesia sebagai kontribusi normatif untuk memperbaiki tata kelola lingkungan dan memperkuat integritas kepemimpinan politik ke depan. Seluruh proses penelitian dilakukan melalui tinjauan literatur secara khusus dengan menelusuri sumber-sumber berita daring terkait bencana ekologis di Sumatera sebagai sumber utama dan sumber-sumber akademis seperti Alkitab, buku, dan artikel jurnal melalui sumber data terpercaya seperti perpustakaan dan google scholar. Data yang terhimpun dianalisis secara kualitatif melalui sintesis premis-premis untuk menghasilkan kesimpulan etis-teologis yang argumentatif dan logis.

Hasil dan Pembahasan

Fenomena Bencana Ekologis dan Tata Kelola Pemerintahan

Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 menimbulkan dampak ekologis dan sosial yang sangat luas. Ratusan jiwa meninggal, ribuan luka-luka, dan ratusan ribu rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan. Studi Celios memperkirakan kerugian ekonomi mencapai sekitar 68,67 triliun rupiah, jauh melampaui kontribusi ekonomi jangka pendek dari praktik deforestasi sawit dan pertambangan.¹⁰ Sepekan setelah bencana, sejumlah wilayah masih terisolasi karena akses jalan terputus.¹¹ Kondisi ini menunjukkan gabungan antara intensitas bencana yang ekstrem dan keterbatasan kapasitas penanganan di tingkat lokal maupun nasional.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar menjadi pemicu utama banjir besar, dengan volume harian melebihi rata-rata curah hujan bulanan.¹² Namun, aktor lingkungan seperti WALHI

¹⁰ "Dampak Kerugian Ekonomi Bencana Banjir Sumatera," celios.co.id, diakses 10 Desember 2025, <https://celios.co.id/dampak-kerugian-ekonomi-bencana-banjir-sumatera/>.

¹¹ Baharudin Al Farisi dan Nawir Arsyad Akbar, "Ini Daftar Wilayah yang Masih Terisolasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar," nasional.kompas.com, diakses 10 Desember 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/08/06440271/ini-daftar-wilayah-yang-masih-terisolasi-di-aceh-sumut-dan-sumbar?page=all#page2>; Isal Mawardi, "Sejumlah Lokasi di Sumut Terisolasi, BNPB Ungkap Kondisi Warga," news.detik.com, diakses 10 Desember 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8250096/sejumlah-lokasi-di-sumut-terisolasi-bnpb-ungkap-kondisi-warga>.

¹² Rahel Narda Chaterine dan Dani Prabowo, "BMKG Ungkap Penyebab Banjir Sumatera: Curah Hujan Bulanan Tumpah dalam Satu Hari," nasional.kompas.com, diakses 10 Desember 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/01/15570891/bmkg-ungkap-penyebab-banjir-sumatera-curah-hujan-bulanan-tumpah-dalam-satu>.

menyoroti bahwa kerentanan ekologis telah dibentuk jauh sebelum fenomena cuaca ekstrem. Deforestasi, degradasi DAS, dan ekspansi industri ekstraktif mengurangi daya serap tanah dan memperburuk limpasan air. Dengan demikian, bencana ini tidak semata-mata merupakan akibat fenomena alam, tetapi juga merupakan akumulasi kerentanan ekologis yang terbentuk oleh pemanfaatan lahan dan lemahnya pengawasan lingkungan. WALHI menekankan perlunya evaluasi perizinan, penguatan Analisis Risiko Bencana, dan penegakan hukum sebagai langkah untuk mencegah bencana serupa.¹³

Merespons kritik tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkum Kehutanan) telah melakukan verifikasi lapangan, penyegelan sejumlah lokasi ilegal, pemanggilan subjek hukum, serta langkah restorasi hulu DAS. Upaya ini menunjukkan adanya mekanisme respons negara, meskipun efektivitas dan konsistensinya masih menjadi ruang evaluasi publik.¹⁴ Di sisi lain, sejumlah pakar menyoroti kelemahan koordinasi dan kesiapsiagaan pemerintah. Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, menilai bahwa keterlambatan respons disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar-lembaga serta kendala anggaran.¹⁵ Sementara itu, Tri Hastuti Nur Rochimah menekankan pentingnya komunikasi publik yang konsisten dan empatik dalam penanganan bencana, mengingat komunikasi yang defensif atau kontradiktif dapat merusak kepercayaan masyarakat.¹⁶

Kritik publik juga muncul terhadap tindakan dan pernyataan beberapa pejabat publik yang dinilai kontroversial dan memanfaatkan situasi bencana untuk pencitraan.¹⁷ Meskipun tidak semua pejabat memiliki motif serupa dan beberapa membantah tuduhan tersebut, fenomena ini memperlihatkan persoalan integritas komunikasi publik dalam situasi krisis. Pernyataan kontroversial pejabat, seperti himbuan terhadap penggalangan donasi atau komentar yang tidak relevan dengan kondisi di lapangan, memperkuat persepsi adanya ketidaksensitifan terhadap penderitaan masyarakat.¹⁸ Namun demikian, perlu dicatat bahwa tidak semua tindakan pemerintah dapat digeneralisasi sebagai pencitraan; beberapa hambatan yang muncul dapat berasal dari keterbatasan struktural, tekanan politik, dan

¹³ "Legalisasi Bencana Ekologis di Sumatera dan Tuntutan Tanggung Jawab Negara serta Korporasi," walhi.or.id, diakses 10 Desember 2025, https://www.walhi.or.id/legalisasi-bencana-ekologis-di-sumatera-dan-tuntutan-tanggung-jawab-negara-serta-korporasi#_ftnref1.

¹⁴ Irsyan Hasyim, "Walhi Desak Kemenhut Tindak Aktivitas Ilegal dan Cabut Izin Perusahaan Penyebab Banjir Sumatera," tempo.co, diakses 10 Desember 2025, <https://www.tempo.co/lingkungan/walhi-desak-kemenhut-tindak-aktivitas-ilegal-dan-cabut-izin-perusahaan-penyebab-banjir-sumatera-2097501>.

¹⁵ "Respons Pemerintah dalam Tangani Bencana di Sumatera Dinilai Lambat," voiceindonesia.co, diakses 10 Desember 2025, <https://voiceindonesia.co/nasional/news/02/12/2025/65235/respons-pemerintah-dalam-tangani-bencana-di-sumatera-dinilai-lambat/>.

¹⁶ "Lambat dan Kurang Koordinatif, Penanganan Banjir Sumatera Dikecam Pengamat Komunikasi," umy.ac.id, diakses 10 Desember 2025, <https://www.umy.ac.id/lambat-dan-kurang-koordinatif-penanganan-banjir-sumatera-dikecam-pengamat-komunikasi/>.

¹⁷ Dede Leni Mardianti, "Serba-serbi Isu Pejabat Cari Panggung di Tengah Bencana Sumatera," tempo.co, diakses 10 Desember 2025, <https://www.tempo.co/politik/serba-serbi-isu-pejabat-cari-panggung-di-tengah-bencana-sumatera-2096386>.

¹⁸ Ikror, "Menteri Sosial Gus Ipul Menambah Panjang Kontroversi Pejabat di Tengah Derita Banjir Sumatera," pojoksatu.id, diakses 10 Desember 2025, <https://www.pojoksatu.id/nasional/1086936922/menteri-sosial-gus-ipul-menambah-panjang-kontroversi-pejabat-di-tengah-derita-banjir-sumatera>.

kondisi lapangan yang sulit diakses.

Keputusan pemerintah Indonesia untuk menolak bantuan internasional juga menjadi sumber perdebatan. Pemerintah beralasan bahwa sumber daya nasional masih memadai untuk menangani bencana. Namun, sejumlah pihak menilai keputusan ini berpotensi memperlambat proses pemulihan dan rekonstruksi, mengingat skala bencana yang sangat besar dan kapasitas daerah yang terbatas. Penetapan status bencana nasional yang belum dilakukan turut memengaruhi mobilisasi sumber daya yang lebih cepat dan terkoordinasi. Dampak ekonomi dan sosial, terutama di daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi, menegaskan urgensi evaluasi terhadap kebijakan penanganan bencana.¹⁹

Berdasarkan temuan-temuan di atas, dapat diidentifikasi setidaknya lima isu etis dalam tata kelola bencana ekologis di Sumatera. Pertama, tanggung jawab moral atas pengelolaan lingkungan hidup, terutama terkait deforestasi dan pemanfaatan sumber daya alam. Kedua, isu keadilan sosial dalam tata kelola risiko bencana, termasuk perlindungan bagi kelompok rentan. Ketiga, isu kepastian dan keadilan hukum terkait penegakan regulasi lingkungan dan pengelolaan hutan serta izin usaha. Keempat, isu solidaritas dan kepedulian sosial yang tercermin dari masalah kecepatan dan sensitivitas respons pemerintah. Kelima, isu integritas politik dalam komunikasi publik dan tindakan pejabat pada masa krisis. Kelima isu ini bukan hanya mencerminkan kelemahan teknis dalam penanganan bencana, tetapi juga memperlihatkan tantangan moral yang lebih mendalam dalam kepemimpinan politik di Indonesia.

Kerangka Etis-Teologis Kolose 3:17

Kitab Kolose ditulis oleh Paulus untuk meneguhkan jemaat agar bertumbuh menuju kedewasaan dalam Kristus melalui pengenalan yang benar akan Dia, sekaligus memperingatkan mereka terhadap ajaran-ajaran sesat yang tidak menghasilkan pertumbuhan rohani.²⁰ Paulus menegaskan keutamaan Kristus atas seluruh ciptaan dan karya pendamaian-Nya bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, pencipta dan pemelihara segala sesuatu, kepala jemaat, dan melalui kematian-Nya Allah mendamaikan manusia dan seluruh ciptaan. Karena itu, Paulus menasihati orang percaya untuk tetap teguh dalam iman dan pengharapan Injil (Kol. 1:15-23).

Kolose 3:17 dalam bahasa asli berbunyi: *καὶ πάν, ὃ τι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι Κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ Θεῷ Πατρὶ δι' αὐτοῦ*. Frasa “segala sesuatu yang kamu lakukan” – ὃ τι ἐὰν ποιῆτε – menekankan tindakan konkret yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Bentuk kata kerja ποιῆτε menunjukkan tindakan nyata dalam dimensi etika dan pemuridan, suatu tindakan yang berorientasi pada keteladanan Tuhan Yesus (Yoh. 13:15) dan yang berkaitan dengan kemurahan hati (Luk.

¹⁹ Halbert Chaniago, “Pemerintah Tolak Bantuan Asing, Pemulihan Wilayah Terdampak Banjir-Longsor di Sumatra Diprediksi Butuh 30 Tahun,” *bbc.com*, diakses 10 Desember 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cly16g07r7ro>.

²⁰ Dave Hagelberg, *Tafsiran Surat Kolose*, trans. oleh Yohanes Effendi (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2013).

12:33), berbelas kasihan yang bersumber dari Injil (Yud. 22-25), serta ketekunan dalam berbuat baik (Gal. 6:9).²¹ Sementara konstruksi ὁ τὸ ἐὶν memberikan nuansa universal yaitu tindakan tersebut berlaku dalam segala situasi, terhadap siapa pun, dan dalam konteks apa pun.

Istilah “nama” – ὀνόματι – merupakan kata benda datif yang berfungsi menunjukkan tujuan dan orientasi tindakan. Frasa “lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus” menegaskan bahwa tindakan moral orang percaya tidak bersifat netral, melainkan harus mencerminkan karakter dan otoritas Kristus. Hal ini menekankan dimensi representasional: tindakan orang percaya menjadi perpanjangan nilai-nilai Kristus dalam ruang sosial maupun publik. Adapun, frasa “mengucap syukur” – εὐχαριστοῦντες – menempatkan syukur sebagai landasan moral yang menguduskan tindakan sehari-hari. Ucapan syukur dalam Alkitab bukan sekadar ekspresi emosional sesaat, melainkan orientasi iman sebagai umat tebusan yang disengaja dan diarahkan kepada Allah. Syukur menjadi penanda akuntabilitas orang percaya kepada Allah dalam setiap tindakan dan keputusannya.²²

Berdasarkan analisis atas ketiga ekspresi kunci tersebut, Kolose 3:17 memuat tiga prinsip etis-teologis utama. Pertama, totalitas moral: segala tindakan manusia khususnya orang percaya, baik privat maupun publik, memiliki konskuensi etis dan tidak dapat dilepaskan dari iman kepada Kristus. Kedua, representasi etis yaitu manusia khususnya orang percaya dipanggil untuk bertindak demi dan sesuai dengan karakter Kristus, yang tercermin dalam integritas, kemurahan hati, kerendahan hati, komitmen, dan keadilan. Ketiga, akuntabilitas teologis yaitu tindakan manusia khususnya orang percaya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan ditentukan oleh kepentingan pribadi, tekanan politik, atau kalkulasi ekonomi semata.

Implikasi prinsip-prinsip ini bagi konteks bencana ekologis di Sumatera bersifat langsung dan kritis. Mandat Kejadian 1:26 dan 2:15 menegaskan bahwa manusia adalah penata layan ciptaan. Oleh sebab itu, kepemimpinan politik Indonesia dipanggil untuk menjalankan pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab, menegakkan keadilan ekologis bagi masyarakat rentan, menjaga integritas dan akuntabilitas komunikasi publik, serta membangun sistem keadilan sosial dalam penanganan korban bencana. Prinsip etis-teologis Kolose 3:17 memberikan evaluasi normatif terhadap praktik-praktik politik dan tata kelola ekologis yang mengabaikan keutuhan ciptaan dan keselamatan masyarakat.

Dari hasil analisis keseluruhan tersebut, Kolose 3:17 memberikan dasar interpretasi mengenai keutamaan Kristus dan tuntutan totalitas moral serta membentuk kerangka etis-teologis yang utuh yaitu tindakan manusia mesti bersifat holistik, merepresentasikan Kristus, dan bertanggung jawab kepada Allah. Konstruksi ini memberikan titik temu antara pesan teologis Paulus dan fenomena bencana ekologis di Sumatera yaitu bahwa dengan menempatkan perilaku manusia dalam kerangka kepemilikan Kristus atas ciptaan, teks ini

²¹ “Bible Hub: Search, Read, Study the Bible in Many Languages,” n.d., n. diakses 10 9 Desember 2025. <https://biblehub.com/greek/4160.htm>.

²² “Bible Hub: Search, Read, Study the Bible in Many Languages,” n. diakses 9 Desember 2025. <https://biblehub.com/greek/2168.htm>.

menyediakan landasan normatif bagi koreksi etis terhadap kepemimpinan politik dan pengelolaan ekologis di Indonesia. Dengan demikian, analisis etis-teologis ini merupakan satu kesatuan antara kajian biblis dan tinjauan krisis ekologis sebagai persoalan moral manusia Indonesia khususnya bagi pemimpin-pemimpin politik yang menuntut pertobatan struktural, mewujudkan keadilan ekologis, dan mendorong kepemimpinan politik yang memiliki tanggung jawab di hadapan Allah, bukan untuk menguntungkan diri sendiri atau golongannya.

Analisis Etis-Teologis dalam Bencana Ekologis Sumatera:

Dialektika Kepemimpinan Berbasis Kolose 3:17

Fenomena bencana ekologis di Sumatera memperlihatkan krisis integritas dalam kepemimpinan politik Indonesia yang dapat dianalisis melalui tiga pilar etis-teologis utama berdasarkan prinsip Kolose 3:17.

Pertama, krisis integritas antara kebijakan dan mandat pemeliharaan ciptaan. Persoalan deforestasi di Sumatera bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan ketidaksiharasan antara perkataan dan perbuatan. Kolose 3:17 memberikan standar bahwa segala sesuatu yang dilakukan baik dalam perkataan dan perbuatan harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Standar ini menuntut integritas total, di mana kebijakan politik harus menjadi representasi karakter Kristus yang memelihara kehidupan, bukan mengeksploitasinya. Ketika pemerintah membiarkan alih fungsi lahan masif di ekosistem Batang Toru dan hulu DAS Singkil demi akumulasi modal korporasi, terjadi diskoneksi teologis yang parah.²³ Pemimpin politik telah gagal bertindak sebagai wakil Allah dan terjebak dalam pemberhalaan ekonomi yang mengorbankan keseimbangan dan kelestarian ekologis. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap mandat syukur dalam Kolose 3:17; alih-alih mengelola alam sebagai persembahan syukur kepada Allah, alam justru dijadikan tumbal bagi kepentingan ekonomi jangka pendek.

Kedua, ketidakadilan struktural dan pengabaian terhadap kelompok rentan. Ketimpangan antara tingginya angka kemiskinan di wilayah kaya sumber daya alam – seperti aceh (12,33%) dan Sumatera Utara – menunjukkan bahwa tata kelola risiko bencana di Indonesia cacat secara moral.²⁴ Secara etis-teologis, kepemimpinan politik yang dilakukan ‘dalam nama Tuhan’ seharusnya mencerminkan keadilan Allah yang berpihak kepada yang lemah (bdk. Kol. 3:25). Namun, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa masyarakat lokal menanggung beban ekologis terbesar sementara keuntungan ekonomi dinikmati oleh segelintir elit. Pengabaian terhadap transparansi dalam penyelidikan delapan

²³ Shaza Zahra, “Deforestasi: Pengertian, Dampak, Upaya, dan Contoh Nyata yang Harus Kamu Ketahui,” *gramedia.com*, diakses 11 Desember 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/deforestasi-pengertian-dampak-upaya-dan-contoh-nyata-yang-harus-kamu-ketahui/>; “Legalisasi Bencana Ekologis di Sumatera dan Tuntutan Tanggung Jawab Negara serta Korporasi.”

²⁴ Alicia Diahwahyuningtyas dan Resa Eka Ayu Sartika, “Tingkat Kemiskinan 2025 di 38 Provinsi Indonesia, Mana yang Tertinggi?,” *kompas.com*, diakses 11 Desember 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/10/04/083000565/tingkat-kemiskinan-2025-di-38-provinsi-indonesia-mana-yang-tertinggi->.

perusahaan yang diduga memicu banjir memperlihatkan bahwa hukum sering kali tunduk pada kekuatan politik.²⁵ Dalam perspektif Kolose 3:17, penegakan hukum yang bias adalah bentuk pengkhianatan terhadap akuntabilitas etis. Kepemimpinan yang berintegritas menuntut agar tata kelola lingkungan didasarkan pada kebenaran yang membebaskan, bukan pada kerahasiaan yang melindungi perusak lingkungan.

Ketiga, kegagalan representasi etis dalam komunikasi publik dan empati. Pilar ketiga yang menjadi jantung persoalan adalah runtuhnya etika kepedulian dalam merespons penderitaan korban. Pernyataan pejabat publik yang defensif, meremehkan solidaritas masyarakat sipil, hingga kecenderungan mencari popularitas di atas tragedi, merupakan bentuk kegagalan komunikasi teologis.²⁶ Komunikasi publik bukan sekadar teknik dalam menyampaikan informasi, melainkan tindakan moral yang merepresentasikan kehadiran Allah yang menghibur dalam krisis. Jika setiap perkataan harus dilakukan dalam nama Tuhan (Kol. 3:17), maka narasi pejabat negara seharusnya memancarkan empati dan sensitivitas Kristus, bukan superioritas kekuasaan yang narsistik. Ketidaksiapan logistik dan terisolasinya korban selama sehari-hari bukan sekadar masalah manajerial, tetapi kegagalan mendasar dalam mempraktikkan etika kepedulian yang menjadi inti dari kepemimpinan Kristen.²⁷ integritas komunikasi publik pejabat adalah ukuran sejauh mana mereka menghormati Allah melalui penghormatan terhadap martabat manusia yang sedang menderita.

Implikasi Etis-Praktis bagi Pemerintah Indonesia

Berdasarkan analisis etis-teologis atas fenomena bencana ekologis dan prinsip Kolose 3:17, terdapat tiga implikasi etis-praktis yang dapat menjadi pedoman bagi kepemimpinan

²⁵ Oyuk Ivani Siagian, "Kementerian Lingkungan Hidup Ungkap 8 Perusahaan Diduga Memicu Banjir dan Longsor di Sumatera," tempo.co, diakses 11 Desember 2025, <https://www.tempo.co/hukum/kementerian-lingkungan-hidup-ungkap-8-perusahaan-diduga-memicu-banjir-dan-longsor-di-sumatera-2096931>; Atalya Puspa, "Daftar Perusahaan yang Disegel, Diduga Picu Banjir di Sumatera," mediaindonesia.com, diakses 11 Desember 2025, <https://mediaindonesia.com/humaniora/838571/daftar-perusahaan-yang-disegel-diduga-picu-banjir-di-sumatera>.

²⁶ Adhyasta Dirgantara dan Dani Prabowo, "Puan Sentil Kepala BNPB Usai Sebut Banjir Sumatera Cuma Mencekam di Medsos: Lebih Baik Berempati," nasional.kompas.com, diakses 11 Desember 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/03/19215781/puan-sentil-kepala-bnpb-usai-sebut-banjir-sumatera-cuma-mencekam-di-medsos>; "Anggota DPR Sindir Donasi Banjir Warga Cuma Rp10 M: Sok Paling-paling"; "Anggota DPR Minta Maaf ke Ferry Irwandi soal Sok Paling Aceh-Sumatra"; Muhammad Alfin Syaghaf Hidayat dan Venessa Rizki Azhari, "Kepemimpinan di Tengah Krisis: Antara Tindakan Nyata dan Pencitraan pada Bencana Banjir di Sumatera," suarakalbar.co.id, diakses 11 Desember 2025, <https://www.suarakalbar.co.id/2025/12/kepemimpinan-di-tengah-krisis-antara-tindakan-nyata-dan-pencitraan-pada-bencana-banjir-di-sumatera/>; Safari Sidakaton, "FKMHII: Jangan Bangun Popularitas di Atas Penderitaan Warga," harianterbit.com, diakses 11 Desember 2025, <https://www.harianterbit.com/nasional/27416383388/fkmhii-jangan-bangun-popularitas-di-atas-penderitaan-warga>; Mardianti, "Serba-serbi Isu Pejabat Cari Panggung di Tengah Bencana Sumatera."

²⁷ Bahagia dan Chaniago, "Lima Pernyataan dan Tindakan Para Pejabat yang Dinilai 'Tidak Empati' kepada Korban Banjir Sumatra - 'Perlu Empati yang Lebih Baik'"; Dede Leni Mardianti, "Banjir Sumatera: Jumlah Korban, Penjarahan, Hingga Penyaluran Bantuan," tempo.co, diakses 11 Desember 2025, <https://www.tempo.co/politik/banjir-sumatera-jumlah-korban-penjarahan-hingga-penyaluran-bantuan-2094628>; Mawardi, "Sejumlah Lokasi di Sumut Terisolasi, BNPB Ungkap Kondisi Warga"; Farisi dan Akbar, "Ini Daftar Wilayah yang Masih Terisolasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar."

politik Indonesia dalam mencegah dan memitigasi bencana ekologis di masa mendatang. Pertama, pemerintah perlu menata ulang tata kelola lingkungan hidup melalui reforma agraria yang berkeadilan ekologis. Langkah ini mencakup percepatan pembentukan regulasi mengenai masyarakat hukum adat sebagai pemelihara setia dalam menjaga keseimbangan alam, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin konsesi di kawasan hutan kritis, dan peninjauan kembali izin usaha yang terbukti berkontribusi pada kerusakan ekosistem hutan. Selain itu, reforestasi berskala besar di kawasan Bukit Barisan dan wilayah terdampak deforestasi harus menjadi prioritas. Reformasi ini merupakan penerjemahan etis dari mandat pengelolaan ciptaan secara bertanggung jawab yaitu sebuah tindakan yang selaras dengan prinsip bertindak “dalam nama Tuhan Yesus,” yakni dengan memperhatikan keutuhan dan keberlanjutan ciptaan.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat sistem akuntabilitas dalam pengelolaan hutan dan penanggulangan bencana. Hal ini mencakup transparansi dalam proses perizinan, pengawasan independen terhadap industri berbasis sumber daya alam, serta peningkatan kapasitas lembaga penanggulangan bencana. Penguatan anggaran pada level nasional maupun daerah menjadi bagian penting untuk memastikan respons yang cepat dan efektif. Prinsip akuntabilitas dalam Kolose 3:17 menuntut bahwa setiap struktur dan keputusan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif, bukan sekadar memenuhi kepentingan politik jangka pendek.

Ketiga, pemerintah perlu membangun sistem kaderisasi kepemimpinan politik yang berbasis meritokrasi serta mengembangkan mekanisme komunikasi publik yang terpusat, terpadu, dan responsif. Kepemimpinan yang kompeten dan berintegritas merupakan syarat untuk menghadirkan tata kelola yang selaras dengan etos etis-teologis Kolose 3:17 yaitu kepemimpinan yang dapat dipercaya dan mampu mewakili nilai keadilan dan kebenaran. Komunikasi publik yang terkoordinasi membantu mencegah disinformasi, mengurangi kepanikan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terutama warganet di era digitalisasi ini pada negara, khususnya di masa krisis.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bencana ekologis di Sumatera pada November 2025 merupakan manifestasi dari krisis integritas kepemimpinan politik yang dapat dilihat dari lensa etis-teologis Kolose 3:17. Melalui pendekatan hermeneutika sosial, ditemukan bahwa kegagalan tata kelola lingkungan di Indonesia berakar pada tiga persoalan mendasar: pertama, adanya dikotomi antara kebijakan normatif dengan praktik di lapangan yang destruktif; kedua, ketidakadilan structural yang mengabaikan keselamatan kelompok rentan demi kepentingan ekonomi; dan ketiga, rendahnya sensitivitas dan empati dalam komunikasi publik yang mencerminkan krisis etis pejabat negara. Temuan ini menegaskan bahwa prinsip totalitas dalam Kolose 3:17 memberikan koreksi terhadap gaya kepemimpinan yang narsistik dan teknokratis, menuntut adanya keselarasan antara perkataan dan perbuatan sebagai wujud akuntabilitas di hadapan Tuhan.

Sebagai langkah tindak lanjut, penelitian ini memberikan dua poin sasaran strategis. Pertama, perlunya pengembangan studi interdisipliner mengenai kepemimpinan politik dan etika ekologis, mengingat krisis ekologis yang sangat mengawatirkan bagi tatanan kehidupan, di mana krisis ekologis bukan sekadar persoalan lingkungan melainkan sudah menjadi bagian integral dari polikrisis yang melanda dunia. Kedua, perlunya membangun sinergitas yang kuat antara lembaga-lembaga penelitian dan pendidikan untuk membangun riset ekologis yang menyeluruh secara saintifik dan teologis. Kolaborasi ini penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan publik bagi pemerintah agar menghasilkan kebijakan yang terukur dan berkeadilan, serta membangun solidaritas politik etis-teologis yang mampu mengawal integritas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam di masa depan.

Referensi

- Agungnoe. "Bencana Banjir Bandang Sumatra, Pakar UGM Sebut Akibat Kerusakan Ekosistem Hutan di Hulu DAS." [ugm.ac.id](https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-sumatra-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/). Diakses 9 Desember 2025.
- Anggrini, Mely. "Ahli ITB Ungkap Interaksi Atmosfer-Geospasial di Balik Banjir Bandang dan Longsor Sumatera." Diedit oleh Anggun Nindita. [itb.ac.id](https://itb.ac.id/berita/ahli-itb-ungkap-interaksi-atmosfergeospasial-di-balik-banjir-bandang-dan-longsor-sumatera/63133). Diakses 10 Desember 2025.
- Avisena, M Ilham Ramadhan. "Bencana Sumatra adalah Bentuk Gagalnya Kebijakan Ekologis." [mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/836152/bencana-sumatra-adalah-bentuk-gagalnya-kebijakan-ekologis). Diakses 9 Desember 2025.
- Bahagia, Iwan, dan Halbert Chaniago. "Lima Pernyataan dan Tindakan Para Pejabat yang Dinilai 'Tidak Empati' kepada Korban Banjir Sumatra - 'Perlu Empati yang Lebih Baik.'" [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy9500835y1o). Diakses 9 Desember 2025.
- "Bible Hub: Search, Read, Study the Bible in Many Languages," n.d.
- celios.co.id. "Dampak Kerugian Ekonomi Bencana Banjir Sumatera." Diakses 10 Desember 2025. <https://celios.co.id/dampak-kerugian-ekonomi-bencana-banjir-sumatera/>.
- Chaniago, Halbert. "Pemerintah Tolak Bantuan Asing, Pemulihan Wilayah Terdampak Banjir-Longsor di Sumatra Diprediksi Butuh 30 Tahun." [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cly16g07r7ro). Diakses 10 Desember 2025.
- Chaterine, Rahel Narda, dan Dani Prabowo. "BMKG Ungkap Penyebab Banjir Sumatera: Curah Hujan Bulanan Tumpah dalam Satu Hari." [nasional.kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2025/12/01/15570891/bmkg-ungkap-penyebab-banjir-sumatera-curah-hujan-bulanan-tumpah-dalam-satu). Diakses 10 Desember 2025.
- cnnindonesia.com. "Anggota DPR Minta Maaf ke Ferry Irwandi soal Sok Paling Aceh-Sumatra." Diakses 10 Desember 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251209154346-20-1304643/anggota-dpr>

- minta-maaf-ke-ferry-irwandi-soal-sok-paling-aceh-sumatra.
cnnindonesia.com. "Anggota DPR Sindir Donasi Banjir Warga Cuma Rp10 M: Sok Paling-paling." Diakses 10 Desember 2025.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251209060858-32-1304370/anggota-dpr-sindir-donasi-banjir-warga-cuma-rp10-m-sok-paling-paling>.
- Diahwahyuningtyas, Alicia, dan Resa Eka Ayu Sartika. "Tingkat Kemiskinan 2025 di 38 Provinsi Indonesia, Mana yang Tertinggi?" *kompas.com*. Diakses 11 Desember 2025.
<https://www.kompas.com/tren/read/2025/10/04/083000565/tingkat-kemiskinan-2025-di-38-provinsi-indonesia-mana-yang-tertinggi->.
- Dirgantara, Adhyasta, dan Dani Prabowo. "Puan Sentil Kepala BNPB Usai Sebut Banjir Sumatera Cuma Mencekam di Medsos: Lebih Baik Berempati." *nasional.kompas.com*. Diakses 11 Desember 2025.
<https://nasional.kompas.com/read/2025/12/03/19215781/puan-sentil-kepala-bnpb-usai-sebut-banjir-sumatera-cuma-mencekam-di-medsos>.
- Farisi, Baharudin Al, dan Nawir Arsyad Akbar. "Ini Daftar Wilayah yang Masih Terisolasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar." *nasional.kompas.com*. Diakses 10 Desember 2025.
<https://nasional.kompas.com/read/2025/12/08/06440271/ini-daftar-wilayah-yang-masih-terisolasi-di-aceh-sumut-dan-sumbar?page=all#page2>.
- Hagelberg, Dave. *Tafsiran Surat Kolose*. Diterjemahkan oleh Yohanes Effendi. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2013.
- Hasyim, Irsyan. "Walhi Desak Kemenhut Tindak Aktivitas Ilegal dan Cabut Izin Perusahaan Penyebab Banjir Sumatera." *tempo.co*. Diakses 10 Desember 2025.
<https://www.tempo.co/lingkungan/walhi-desak-kemenhut-tindak-aktivitas-ilegal-dan-cabut-izin-perusahaan-penyebab-banjir-sumatera-2097501>.
- Hidayat, Muhammad Alfin Syaghaf, dan Venessa Rizki Azhari. "Kepemimpinan di Tengah Krisis: Antara Tindakan Nyata dan Pencitraan pada Bencana Banjir di Sumatera." *suarakalbar.co.id*. Diakses 11 Desember 2025.
<https://www.suarakalbar.co.id/2025/12/kepemimpinan-di-tengah-krisis-antara-tindakan-nyata-dan-pencitraan-pada-bencana-banjir-di-sumatera/>.
- Ikror. "Menteri Sosial Gus Ipul Menambah Panjang Kontroversi Pejabat di Tengah Derita Banjir Sumatera." *pojoksatu.id*. Diakses 10 Desember 2025.
<https://www.pojoksatu.id/nasional/1086936922/menteri-sosial-gus-ipul-menambah-panjang-kontroversi-pejabat-di-tengah-derita-banjir-sumatera>.
- Indrastuti. "Forum Dialog Konservasi Indonesia Desak RUU Kehutanan Pertimbangkan Kegentingan Ekologis." *mediaindonesia.com*. Diakses 9 Desember 2025.
<https://mediaindonesia.com/humaniora/835405/forum-dialog-konservasi-indonesia-desak-ruu-kehutanan-pertimbangkan-kegentingan-ekologis>.
- jakartasatu.com*. "Jatam: Bencana Sumatra Hasil Rancangan Negara." Diakses 9 Desember 2025.
<https://jakartasatu.com/2025/12/09/jatam-bencana-sumatra-hasil-rancangan-negara/>.
- Jelita, Insi Nantika. "Kerugian Akibat Bencana Sumatra Ditaksir Mencapai Rp68,67 Triliun." *mediaindonesia.com*. Diakses 9 Desember 2025.
<https://mediaindonesia.com/ekonomi/838074/kerugian-akibat-bencana-sumatra>.

ditaksir-mencapai-rp6867-triliun.

Mardianti, Dede Leni. "Banjir Sumatera: Jumlah Korban, Penjarahan, Hingga Penyaluran Bantuan." tempo.co. Diakses 11 Desember 2025. <https://www.tempo.co/politik/banjir-sumatera-jumlah-korban-penjarahan-hingga-penyaluran-bantuan-2094628>.

———. "Serba-serbi Isu Pejabat Cari Panggung di Tengah Bencana Sumatera." tempo.co. Diakses 10 Desember 2025. <https://www.tempo.co/politik/serba-serbi-isu-pejabat-cari-panggung-di-tengah-bencana-sumatera-2096386>.

Mawardi, Isal. "Sejumlah Lokasi di Sumut Terisolasi, BNPB Ungkap Kondisi Warga." news.detik.com. Diakses 10 Desember 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8250096/sejumlah-lokasi-di-sumut-terisolasi-bnpb-ungkap-kondisi-warga>.

Muhamad, Nabilah. "962 Orang Meninggal dan 291 Orang Hilang dalam Bencana Sumatra (9 Desember 2025)." databoks.katadata.co.id. Diakses 9 Desember 2025. <https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/69378441a41a8/962-orang-meninggal-dan-291-orang-hilang-dalam-bencana-sumatra-9-desember-2025>.

Prahastiwi, Neressa. "Sindiran Endipat Wijaya Soal Donasi 10 M Lewat Ferry Irwandi di Rapat DPR Picu Amarah Para Artis." suara.com. Diakses 10 Desember 2025. <https://www.suara.com/entertainment/2025/12/09/170358/sindiran-endipat-wijaya-soal-donasi-10-m-lewat-ferry-irwandi-di-rapat-dpr-picu-amarah-para-artis?page=all>.

Prasetyo, Andhika. "HKBP: Banjir Sumatra Terjadi Karena Ulah Manusia." mediaindonesia.com. Diakses 9 Desember 2025. <https://mediaindonesia.com/nusantara/836699/hkbp-banjir-sumatra-terjadi-karena-ulah-manusia>.

Puspa, Atalya. "Bencana Berulang di Sumatra, Peringatan Keras dari Hulu yang Rusak." mediaindonesia.com. Diakses 9 Desember 2025. <https://mediaindonesia.com/humaniora/835695/bencana-berulang-di-sumatra-peringatan-keras-dari-hulu-yang-rusak>.

———. "Daftar Perusahaan yang Disegel, Diduga Picu Banjir di Sumatera." mediaindonesia.com. Diakses 11 Desember 2025. <https://mediaindonesia.com/humaniora/838571/daftar-perusahaan-yang-disegel-diduga-picu-banjir-di-sumatera>.

———. "Walhi: Bencana di Sumatra Merupakan Bencana Ekologis, Bukan Semata Dampak Siklon." mediaindonesia.com. Diakses 9 Desember 2025. https://mediaindonesia.com/humaniora/834882/walhi-bencana-di-sumatra-merupakan-bencana-ekologis-bukan-semata-dampak-siklon#goog_rewarded.

Seftian, Kevin. "6 Pernyataan Asbun dari Pejabat Publik Saat Banjir." magdalene.co. Diakses 9 Desember 2025. <https://magdalene.co/story/kontroversi-pernyataan-pejabat-banjir-sumatera/>.

Siagian, Oyuk Ivani. "Kementerian Lingkungan Hidup Ungkap 8 Perusahaan Diduga Memicu Banjir dan Longsor di Sumatera." tempo.co. Diakses 11 Desember 2025. <https://www.tempo.co/hukum/kementerian-lingkungan-hidup-ungkap-8-perusahaan-diduga-memicu-banjir-dan-longsor-di-sumatera-2096931>.

Sidakaton, Safari. "FKMHII: Jangan Bangun Popularitas di Atas Penderitaan Warga."

- harianterbit.com. Diakses 11 Desember 2025. <https://www.harianterbit.com/nasional/27416383388/fkmhii-jangan-bangun-popularitas-di-atas-penderitaan-warga>.
- Suardi, Jemmy Ibnu. "Bencana Sumatera, Sebuah Pandangan Ekoteologis dan Krisis Kebijakan Lingkungan." lampung.baznas.go.id. Diakses 10 Desember 2025. <https://lampung.baznas.go.id/artikel/show/bencana-sumatera-sebuah-pandangan-ekoteologis-dan-krisis-kebijakan-lingkungan/33178>.
- tempo.co. "Bencana di Sumatera Akibat Ulah Manusia." Diakses 9 Desember 2025. https://www.tempo.co/kolom/penyebab-banjir-sumatera-deforestasi-2094600?article_id=b77604fa-8986-4bb0-8c13-c35bfcd3360d&in=1&n_token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1biI6IjB1NDVhODk4YzU4NzI5ODM4NDQ0ZDA0NzZjYzgyM2MzIn0.n3hfYWW6WV-qzF1rn16nhDNszZOhQKGOmMaDoBoC_Dc.
- tribunnews.com. "Ketua DPR RI Puan Maharani Minta Pejabat Jaga Komunikasi saat Bencana." Diakses 9 Desember 2025. <https://www.tribunnews.com/dpr-ri/7763020/ketua-dpr-ri-puan-maharani-minta-pejabat-jaga-komunikasi-saat-bencana>.
- umy.ac.id. "Lambat dan Kurang Koordinatif, Penanganan Banjir Sumatera Dikecam Pengamat Komunikasi." Diakses 10 Desember 2025. <https://www.umy.ac.id/lambat-dan-kurang-koordinatif-penanganan-banjir-sumatera-dikecam-pengamat-komunikasi/>.
- voiveindonesia.co. "Respons Pemerintah dalam Tangani Bencana di Sumatera Dinilai Lambat." Diakses 10 Desember 2025. <https://voiceindonesia.co/nasional/news/02/12/2025/65235/respons-pemerintah-dalam-tangani-bencana-di-sumatera-dinilai-lambat/>.
- walhi.or.id. "Legalisasi Bencana Ekologis di Sumatera dan Tuntutan Tanggung Jawab Negara serta Korporasi." Diakses 10 Desember 2025. https://www.walhi.or.id/legalisasi-bencana-ekologis-di-sumatera-dan-tuntutan-tanggung-jawab-negara-serta-korporasi#_ftnref1.
- Zahra, Shaza. "Deforestasi: Pengertian, Dampak, Upaya, dan Contoh Nyata yang Harus Kamu Ketahui." gamedia.com. Diakses 11 Desember 2025. <https://www.gamedia.com/literasi/deforestasi-pengertian-dampak-upaya-dan-contoh-nyata-yang-harus-kamu-ketahui/>.